

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM PELAKSANAAN KOMITMEN TENTANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Ahmad Burhan Hakim

Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Email: burhanhernandez@gmail.com

Abstrak-Indonesia telah memutuskan untuk ikut dalam **AEC (ASEAN Economic Community/Masyarakat Ekonomi ASEAN)** yang digagas oleh ASEAN. Dengan demikian maka Indonesia harus mengikuti semua aturan yang tertera dalam kesepakatan pasar bebas tersebut. Sehingga Indonesia secara sadar harus membuka pasar dalam negeri sebagai bentuk komitmennya dalam melaksanakan AEC. Hal ini tentunya punya dampak positif dan negatif, disisi lain ada peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas ekonominya, disisi lain Indonesia bisa saja hanya akan menjadi objek dalam kesepakatan tersebut. Mengingat Indonesia terlihat belum siap dalam banyak hal untuk bisa menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Mulai dari Infrastruktur, birokrasi, kepastian hukum, investasi, stabilitas politik dan berbagai aspek lainnya. Kali ini Indonesia sudah terlambat untuk membahas mengenai siap atau tidak, Indonesia dengan segenap tenaga harus mampu menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (AEC). Sehingga Indonesia tidak terjebak dalam diskursus yang tak selesai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur sebagai metode untuk mencari data baik primer, dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam AEC. Dalam kebijakan tersebut peneliti melihat bahwa ada faktor eksternal yang lebih dominan dalam mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam menyepakati AEC, daripada faktor internal yang terdapat didalamnya. Faktor eksternal terdiri dari globalisasi, sistem politik dan ekonomi internasional dan regionalisme. Sedangkan faktor internal terdiri dari aktor pemerintah, politik domestik, militer dan kemajuan ekonomi dalam negeri.

Kata kunci : Asean Economic Community, Pasar Bebas, Studi Literatur, Faktor Eksternal dan Faktor Internal.

I. PENDAHULUAN

Indonesia melakukan pengesahan terkait komitmen pelaksanaan ASEAN Economic Community

Blue Print (Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN) melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 11 Tahun 2011.¹ Inpres tersebut menjelaskan mengenai kesepakatan pemerintah untuk melaksanakan komitmennya terkait AEC (ASEAN Economic Community), hal ini berarti pemerintah Indonesia telah sepakat dengan ASEAN untuk melaksanakan seluruh kesepakatan yang ada dalam AEC. Indonesia juga mengeluarkan beberapa peraturan baik undang-undang maupun Keputusan Presiden/Keppres sebagai bentuk reaksi atau bahkan strategi pemerintah untuk bisa menghadapi ASEAN Economic Community. Aturan-aturan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia guna menghadapi ASEAN Economic Community adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara);
2. Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009
3. Inpres Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA
4. Keppres Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN.
5. Keppres Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations
6. Perpres Nomor 10 tahun 2014 Tentang Pengesahan Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods (Protokol untuk Mengubah

¹<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFjvDIO3MAhXFP48KHVvQAfoQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fpusatdata%2Fdownloadfile%2F4df9a8d3ba7a5%2Fparent%2F4df9a8a5c2e3c&usg=AFQjCNE-FofkaNgBUiNcb5V9fioM1p-Hjg&sig2=s9jBNBgL8RVDQWUwU5hHBQ&bvm=bv.122448493,d.c2l> diakses pada Minggu, 22 Mei 2016

¹<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFjvDIO3MAhXFP48KHVvQAfoQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fpusatdata%2Fdownloadfile%2F4df9a8d3ba7a5%2Fparent%2F4df9a8a5c2e3c&usg=AFQjCNE-FofkaNgBUiNcb5V9fioM1p-Hjg&sig2=s9jBNBgL8RVDQWUwU5hHBQ&bvm=bv.122448493,d.c2l> diakses pada Minggu, 22 Mei 2016

Perjanjian Ekonomi ASEAN Tertentu Terkait Perdagangan Barang)

Awal mula Konsep *ASEAN Economic Community* disepakati pada acara KTT ASEAN Bali Concord II pada tahun 2003. Dimana dalam *ASEAN Community* tersebut disepakati ada tiga pilar yakni *ASEAN Security Community* – *ASC*, *ASEAN Economic Community*- *AEC* dan *ASEAN Socio-Cultural Community*- *ASCC*. pembahasan mengenai *ASEAN Community* sebenarnya sudah tertuang dalam *ASEAN Vision 2020* di Kuala Lumpur pada Desember 1997.²

Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, dengan maksud untuk tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu AEC memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.³

Kebijakan Indonesia tersebut menuai banyak tanggapan dari praktisi ekonomi, pengamat dan akademisi. Edy Burmansyah memberi komentar bahwa dengan masuknya Indonesia dalam AEC maka sesungguhnya Indonesia telah kehilangan kedaulatannya sebagai sebuah bangsa. Indonesia tidak dapat lagi menyusun perencanaan pembangunan ekonominya secara mandiri, segala kebijakan ekonomi Indonesia harus merujuk pada rezim perdagangan bebas ASEAN salah satunya yakni *ASEAN Economic Community*.⁴ Kemudian Didik J. Rachbini anggota DPR (2004-2009) menyatakan bahwa bidang perdagangan dan industri meragukan keuntungan pasar tunggal bagi ekonomi Indonesia. lebih baik memaksimalkan kebijakan perdagangan Indonesia yang sudah sangat terbuka saat ini daripada membuka pintu lebar yang malah merugikan Indonesia.⁵

Pendapat-pendapat tersebut bukan tanpa alasan, ada banyak sektor yang belum disiapkan secara matang oleh Indonesia. Baik iklim investasi, aturan penanaman modal, birokrasi yang modern (tidak berbelit), kepastian hukum, kontinuitas program

pemerintah antar periode dan yang pasti yakni kesiapan dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Ada beberapa pendapat yang menyatakan ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi AEC. Dr. Ganewati Wuryandari (peneliti LIPI) menyatakan bahwa Indonesia secara umum memang bisa dikatakan belum siap untuk menghadapi AEC. Persoalan rumitnya proses birokrasi untuk investasi membuat dana segera yang masuk ke Indonesia lebih lambat daripada negara tetangga. Tekanan eksternal berupa sistem politik dan ekonomi Internasional membuat Indonesia harus membuka diri dan iku dalam AEC. Kalau tidak Indonesia akan diasingkan dalam pergaulan internasional.⁶

Dalam penelitian ini yang akan kemudian akan dibahas dan menjadi persoalan utama yakni faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam meratifikasi *asean economic community blue print*. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk menyepakati pembentukan *ASEAN Economic Community*
2. Untuk mengetahui seberapa jauh kepentingan Indonesia pada *ASEAN Economic Community*
3. Untuk mengetahui seberapa siap Indonesia menghadapi *ASEAN Community/ASEAN Economic Community*

Kemudian peneliti menggunakan konsep kebijakan politik luar negeri dan globalisasi sebagai kerangka teoritik dan dipakai untuk menganalisa fenomena tersebut. Politik luar negeri adalah salah satu instrument penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Tidak hanya persoalan dalam negeri saja yang menjadi tugas utama pemerintah, tapi persoalan hubungan dengan negara lain dan persoalan kepentingan nasional yang akan dicapainya. Menurut Chris Brown politik luar negeri adalah suatu usaha dari sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasional dengan melakukan hubungan terhadap dunia luar.⁷ apa yang disampaikan Brown terkait makna politik luar negeri sebenarnya cukup sederhana.

Menurut Marijke Breuning politik luar negeri adalah suatu aktifitas yang mendefinisikan politik dan interaksi sebuah negara dalam suatu lingkungan antar

² LIPI. Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008. hlm. 24

³<http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=19&l=id> diakses pada tanggal 8 desember 2015 pukul 16.37 WIB

⁴ Op.cit Edy Burmansyah. Rezim Baru ASEAN : Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pustaka sempu. 2014. Hlm. 27-29.

⁵ Op.cit LIPI. Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 2008. Hlm. 130

⁶ Ganewati Wuryandari. Politik Luar Negeri Indonesia : Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional. LIPI. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011. Hlm. 178

⁷ Chris brown. Understanding international relation, 2nd Edition. London. Palgrave. 2001. Hlm. 68-86.

wilayah (negara).⁸ kemudian menurut M. Sabir politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.⁹ ada banyak pendapat mengenai istilah politik luar negeri. Menurut peneliti politik luar negeri tidak lepas dari kepentingan nasional dan interaksi dengan dunia luar. Maka secara jelas setiap apa yang dilakukan oleh suatu negara yang itu disebut sebagai politik luar negeri, tentunya tidak terlepas dari sebuah kepentingan nasional. Apapun strategi yang digunakan maka jelas sekali semua berdasar pada kepentingan nasional. bisa dikatakan politik luar negeri sangat *self deterrence*.

Pada dekade terakhir mungkin ini kita jamak dengan istilah globalisasi. Suatu peristiwa dimana lalu lintas manusia, barang, jasa dan informasi menjadi cepat dan tidak terbatas oleh teritorial suatu negara. Globalisasi tidak hanya persoalan yang bersifat *intangible* tapi juga bersifat *tangible*. Maksudnya bahwa globalisasi tidak hanya membawa lalu lintas secara fisik (manusia, barang dan jasa) namun juga persoalan non - fisik misalkan (budaya dan ideologi).

Menurut Erani Yustika tidak ada konsep tunggal mengenai globalisasi. Dalam beberapa literatur belum disepakati pula kapan globalisasi itu muncul. Namun yang pasti gejala globalisasi ini menguap pada tahun 1990an, setelah runtuhnya negara Uni Soviet sebagai basis sosialisme dunia, sebagai tanda kemenangan kapitalisme global. Namun secara tidak langsung globalisasi memberikan pemahaman mengenai batas teritori negara yang semakin kabur adanya. Sehingga semua arus lalu lintas berupa barang dan jasa tidak mengenal batas wilayah tersebut.¹⁰ dalam pernyataan tersebut peneliti melihat bahwa pasca berakhirnya perang dingin memberikan perubahan besar pada sistem politik dan ekonomi internasional.

Sedangkan menurut Helene S. Nesaduari yang diambil dalam beberapa literature menyebutkan bahwa globalisasi dibagi menjadi tiga bagian dengan penjelesan sebagai berikut. *Pertama*, globalisasi dalam perspektif struktur, dimana ada agent dalam sebuah struktur internasional yang memainkan sebuah peranan. Semisal actor pembuat kebijakan (pemerintah), pelaku usaha, organisasi internasional bahkan individu. Semua aspek tersebut mampu bermain dalam dunia internasional saat ini. *Kedua* menurut Higgot yakni globalisasi dalam perspektif multi-dimensional yang alamiah. Dimana ada suatu kejadian yang alamiah yang terjadi dalam proses globalisasi semisal factor ekonomi yang menimbulkan perdagangan bebas atau liberalisasi pasar. Dimana

aktornya bukan hanya negara saja yang bermain, ini yang disebut Helene sebagai *ideational/cognitive* dalam globalisasi. *Ketiga* menurut Scholte dan Hughes yakni *feature of globalization*, adanya suatu peristiwa perpindahan aktifitas manusia dari negara satu ke negara lain tanpa dipersulit persoalan batas wilayah negara. ini yang disebut sebagai "*reconfiguration social space away from dan beyond notions of delineated territory*".¹¹

Study Pustaka adalah suatu bentuk kajian yang dilakukan dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk membingkai suatu kerangka teoritik. Study pustaka ini digunakan sebagai bentuk telaah akademis mengenai posisi peneliti dalam membentuk opini atau argumentasi tentang suatu penelitian, sehingga ada suatu bentuk afirmasi dari ahli atau peneliti sebelumnya tentang tema yang hampir serupa dengan yang dilakukan oleh peneliti.

Pertama, Ganewati Wuryandari. Politik Luar Negeri Indonesia : Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional. LIPI. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011. Perubahan politik internasional tentunya sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan politik luar negeri suatu negara tak terkecuali Indonesia. Runtuhnya tembok Berlin di Jerman dan bubarnya negara Uni Soviet pada akhir 1980-an mengubah struktur politik internasional, yang awal bipolar menjadi multipolar.¹² Tentunya perubahan tersebut punya dampak dan implikasi bagi banyak negara termasuk Indonesia sendiri. Arus politik maupun ekonomi pun ikut berubah dan terseret didalamnya. Sehingga mau tidak mau negara harus mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut.

Pasca orde baru memberikan tantangan berbeda bagi Indonesia. Krisis ekonomi yang tak kunjung selesai membuat terjadinya krisis multidimensional yang tidak kalah akut. Sistem hukum yang penuh dengan ketidakpastian, birokrasi yang tidak ramah, serta mentak korup bangsa yang semakin tak terkendali membuat Indonesia seolah mati suri bahkan tak berdaya.¹³ Alih-alih ingin membangkitkan sektor ekonomi melalui kosensi regionalism dalam struktur ASEAN, malah membuat Indonesia seolah latah dengan konsep *free trade*. Dimana konsep ekonomi liberal tersebut menurut peneliti malah akan membuat Indonesia semakin terjerebab dalam kemunduran bukan malah sebaliknya.

Dampak dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi politik internasional dan regional ternyata dalam banyak hal tidak banyak membuat ekonomi Indonesia semakin baik. Malah

⁸ Marijke Breuning. Foreign policy analysis : A Comparative introductions. New York. Palgrave Macmillan. 2007 hlm. 5

⁹ H.M. Sabir. Politik Bebas Aktif : Tantangan dan Kesempatan. Jakarta Inti Dayu Press, , 1987. Hlm. 10

¹⁰ Erani Yustika. Ekonomi Politik : Kajian Teoritis dan Analisa Empiris. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011. hlm. 72-73

¹¹ Helene S. Nesadurai. Globalization, Domestic Politics and Regionalism. Routledge. New York. 2003. Hlm. 20.

¹² Ganewati Wuryandari. Politik Luar Negeri Indonesia : Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional. LIPI. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011. Hlm. 3-4

¹³ Ibid. Hlm. 177-180

peneliti melihat indonesia sebagai negara yang paling dirugikan. Maka dengan data dan penjelasan diatas peneliti rasa ada yang keliru dengan Indonesia yang kemudian ikut dalam kesepakatan *ASEAN Community* khususnya dalam *Asean Economy Community* bahkan AFTA. Ini harus dikaji ulang , sehingga diharapkan kejadian yang merugikan tersebut tidak terjadi lagi. Maka kepentingan nasional dan kebutuhan nasional akan selaras dengan kebijakan politik luar negeri yang akurat dan strategis pula.

Kedua, Ganewati Wuryandari. *Politik Luar Negeri Indonesia : Di Tengah Pusaran Politik Domestic*. LIPI. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008. Modalitas Indonesia pasca orde baru tentunya berbeda dengan masa sebelumnya yakni orde lama dan orde baru. Sejak turunnya presiden soeharto pada tahun 1998 yang kemudian menjadi tonggak awal reformasi. Mempunyai tanggungan hutang baik hutang secara finansial, sosial maupun sejarah. Naik habibi sebagai presiden dan langsung dihadapkan pada kasus pelanggaran HAM di timor leste tahun 1970an membuat kinerja politik luar negeri indonesia cenderung imagologis dengan membentuk citra sebagai negara demokratis. Walaupun pada era habibi timor leste akhirnya merdeka dari hasil referendum.¹⁴ Pada era setelahnya yakni Abdurrahman Wahib (Gusdur) , Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Punya pilihan dan kondisi dalam negeri yang berbeda. Memang dalam buku tersebut factor politik domestic menjadi pembahasan utama dalam kaitanya terhadap politik luar negeri Indonesia. Secara konseptual, peneliti melihat adanya suatu pendekatan yang cukup sistematis dan komprehensif dalam menganalisa kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam perspektif politik dalam domestic.

Peneliti mencoba memberikan argumentasi dasar bahwa kepentingan nasional indonesia tidak secara mutlak ada di *ASEAN Community*. Adapun bentuk kepentingan nasional tersebut masih belum komprehensif sesuai dengan kebutuhan nasional yakni pemulihan ekonomi sebagai alasan utama. Karena bagian penting dari *ASEAN Community* yakni *Asean economy Community*. Dimana dalam kesepakatan tersebut ada bentuk liberalisasi pasar dengan bentuk *free trade*. Peneliti melihat indonesia masih belum siap dengan hal tersebut dan seolah memaksakan kehendak atas kesepakatan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian eksplantif. Maksudnya bahwa peneliti menentukan suatu fenomena yang kemudian dianalisa dengan menggunakan teori, konsep maupun pendekatan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini juga digunakan sebagai bahan analisa atas apa yang terjadi dalam

fenonema tersebut dan mengapa fenomena tersebut terjadi.

2. Obyek Penelitian

Untuk memudahkan analisa yang kemudian berujung pada focus penelitian. Maka peneliti menentukan obyek penelitian dalam penelitian ini yakni politik luar negeri Indonesia. Indonesia sebagai obyek primer dalam penelitian yang dilakukan. Karena Indonesia sebagai actor yang juga terlibat dalam pembentukan *ASEAN Community*. Actor kemudian menjadi obyek penelitian. Sedangkan *ASEAN Community* adalah sebagai variable dependent yang kemudian mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang berarti data utama didapatkan dari hasil wawancara dari ahli (Pengamat, Akademisi) atau pelaku kebijakan/praktisi (menteri, anggota dewan dan lain-lain). Sedangkan data sekunder di dapat dari data yang relevan semisal : jurnal, majalah, internet, buku, tugas akhir (S1, S2, maupun S3) dan beberapa data lainnya yang dianggap relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni study pustaka (*library research*). peneliti mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan kemudian melakukan analisa dengan menggunakan data-data tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, dimana data yang diperoleh digunakan sebagai bahan analisa atas pembahasan yang akan diteliti. Maka penggunaan data yang sifatnya informatif atau sudah pada tahap analisis digunakan untuk membedah fenomena yang diteliti.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisa data kualitatif bertujuan untuk menjadikan data-data tersebut sebagai pijakan dalam menganalisa sebuah fenomena yang diteliti. Dimana data yang digunakan tidak hanya berupa angka nominal tapi juga merupakan hasil dari study literasi maupun wawancara yang sifatnya kualitatif.

6. Batasan Penelitian

Untuk mempersempit pembahasan dan mereduksi pengembangan penelitian yang tidak maksimal. Maka batasan penelitian dalam penelitian ini yakni pada tahun 2004-2014. Atau

¹⁴ Ibid hlm. 19-25

pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengapa demikian, karena pada masa tersebutlah Indonesia terlihat begitu antusias untuk menyepakati pembentukan ASEAN Community/ASEAN Economic Community.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ASEAN Sebagai Lingkaran Konsentris Utama Politik Luar Negeri Indonesia

Kepentingan nasional Indonesia dalam Asean Economic Community secara harfiah adalah pembangunan ekonomi nasional. Indonesia seakan melihat bahwa AEC memberikan peluang bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan pembangunan dan kekuatan ekonomi nasional. Ini adalah suatu hal yang wajar, karena setiap negara akan bercita-cita untuk bisa kuat dalam banyak sektor khususnya ekonomi. Maka wajar apabila Indonesia melihat ada peluang ekonomis yang akan dicapainya. Dengan demikian dalam persepektif kepentingan nasional, maka bisa atau tidak Indonesia harus mampu mengejawantahkan kepentingannya tersebut dalam kerjasama AEC.

Indonesia jangan sampai hanya menjadi objek dari banyak kepentingan nasional dari negara lain. Apabila hal tersebut terjadi maka bisa dikatakan bahwa Indonesia tidak berhasil mewujudkan kepentingan nasionalnya dan dengan beberapa perspektif Indonesia tidak memiliki *power capability* untuk mewujudkan hal tersebut. Maka akan benar apabila dikatakan oleh Thomas Hobbes bahwa kemampuan (*power*) suatu negara akan sangat punya pengaruh besar dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Karena setiap apa yang dilakukan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain hampir semua berbicara masalah kepentingan nasional.¹⁵

Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya antusias yang cukup tinggi dalam pembentukan kesepakatan AEC. Dengan demikian, Indonesia tidak bisa mengatakan tidak ikut andil dalam AEC. Apabila Indonesia kemudian menolak AEC tentunya ada sebuah konsekuensi logis yang harus diterima Indonesia. Salah satunya adalah persoalan eksistensi Indonesia di kawasan (khususnya di ASEAN). Indonesia sudah merubah wajah politik luar negerinya semenjak Orde Baru dengan semangat kerjasama dan tidak menggunakan pola kebijakan politik luar negeri yang kaku, anti barat dan tidak ramah terhadap bertetangga

seperti zaman Orde Lama dibawah pimpinan presiden Soekarno. Naif apabila kemudian Indonesia secara tiba-tiba menolak AEC yang secara faktual Indonesia terlibat dalam pembentukan kesepakatan tersebut.

ASEAN menjadi lingkaran konsentris utama dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. konsep tersebut menjelaskan bahwa ASEAN punya signifikansi pengaruh dan peran terhadap dinamika politik luar negeri Indonesia. Maka Indonesia tidak bisa kemudian menutup diri bahkan melakukan politik isolasionis terhadap ASEAN. Inilah adalah sebuah kenyataan yang harus dipahami bersama, bahwa Indonesia butuh ASEAN dan ASEAN pun butuh Indonesia. Ada suatu pola interdependensi politik yang terbangun diantara keduanya.¹⁶

Indonesia punya kebutuhan eksistensi untuk bisa menjalankan politik luar negerinya di ASEAN. Sehingga manakala kebijakan politik luar negeri Indonesia muncul, termasuk salah satunya adalah menyepakati AEC, maka bisa jadi hal tersebut muncul karena adanya suatu kebutuhan dari Indonesia itu sendiri. Terkait kemudian dengan adanya istilah kepentingan nasional dengan berbagai macam rupa dan bentuk, jelas segale kebijakan politik luar negeri Indonesia berlandaskan kepentingan nasional.

Indonesia akan tetap menjadikan ASEAN sebagai lingkaran konsentris utama dalam kebijakan politik luar negeri. Asia tenggara sebagai kawasa paling dekat secara geopolitik bagi Indonesia, maka secara langsung maupun tidak apa yang terjadi di kawasan akan berpengaruh juga terhadap Indonesia. Ganewati wuryandari memberikan pendapat bahwa Indonesia tidak mungkin mengambil kebijakan untuk menolak AEC, hal ini disebabkan ASEAN masih menjadi objek utama dalam kebijakan politik luar negeri. Indonesia akan terisolir bahkan diasingkan dalam pergaulan kawasan apabila melakukan hal tersebut.¹⁷

B. Model Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri menurut William D. Coplin.

William D. Coplin memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai analisis kebijakan politik luar negeri.¹⁸ Konteks Internasional, perilaku dari para pengambil kebijakan (aktor pemerintah), Kondisi ekonomi dan militer dan konteks (kondisi) politik domestik.

¹⁵ H.J. Morgenthau, *Politics Among Nation : The Struggle of Power*, (6th end,new york, 1985). Hlm. 7

¹⁶ Bersumber Dari Wawancara Peneliti dengan Dr. Ganewati Wuryandari peneliti senior LIPI (*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*) bidang politik . Wawancara Dilakukan pada Senin, 24 Januari 2016 di jakarta.

¹⁷ Ibid Bersumber Dari Wawancara Peneliti dengan Dr. Ganewati Wuryandari peneliti senior LIPI (*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*) bidang politik . Wawancara Dilakukan pada Senin, 24 Januari 2016 di jakarta.

¹⁸ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*, Bandung, Penerbit Sinar Baru,. 1992, hlm. 165.

a. Konteks Internasional

Konteks Internasional. Artinya politik internasional punya peranan penting dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Ada tiga elemen penting dalam konteks internasional yang menurut Coplin punya pengaruh dalam kebijakan politik luar negeri yakni geografis, ekonomis dan politik. Kondisi internasional baik secara politik dan ekonomi mau tidak mau menekan Indonesia untuk ikut dalam pusaran arus tersebut. Berakhirnya Perang Dingin memberikan kondisi baru pada sistem politik dan ekonomi global. Liberalisasi dan Kapitalisasi ekonomi yang digawani oleh WTO, IMF dan World Bank serta negara barat (sebagai pemenang Perang Dingin), membawa arus yang kencang yang disebut globalisasi politik dan ekonomi.

Globalisasi ekonomi dan politik serta perubahan lingkungan internasional mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam arah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa globalisasi ekonomi membawa arus yang cukup besar dengan adanya skema liberalisasi dan kapitalisme, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak negara-negara dunia (tak terkecuali Indonesia) harus bisa menyesuaikan diri. Adriana Elisabeth memberikan pandangan bahwa kondisi ekonomi global dan rezim perdagangan internasional (bisa disebut WTO) yang beraliran liberal kapitalis membawa Indonesia untuk bisa menyesuaikan diri. Kebijakan ekonomi Indonesia meliberalisasi pasar dan ikut dalam AEC adalah bagian dari tekanan dari kontes internasional yang tidak bisa dibendung oleh Indonesia.¹⁹

b. Prilaku Pengambilan Kebijakan / Aktor Pemerintah

Presiden adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Presiden adalah simbol negara dan juga simbol pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa presiden punya peranan penting sebagai aktor pemerintah. Dari sejak Orde Lama, Orde Baru dan Pasca Orde Baru, corak dan arah politik luar negeri Indonesia bisa dilihat dari siapa yang memimpin atau yang menjadi presiden Indonesia. Soekarno punya arah kebijakan politik luar negeri yang berbeda dengan Soeharto begitupun seterusnya.

Ganewati Wuryandari memberikan pendapat bahwa periodisasi pemerintahan Indonesia punya

corak dan arah kebijakan politik luar negeri yang berbeda. Selain faktor eksternal berupa kondisi politik dan ekonomi internasional, faktor internal berupa sistem politik dan kepemimpinan nasional (presiden) punya pengaruh penting dalam arah dan corak kebijakan politik luar negeri Indonesia.²⁰ Maka tidak heran apabila kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa.

Peneliti melihat bahwa pada masa SBY terlalu banyak tekanan yang datang dari lingkungan internasional, khususnya pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam AEC. Regionalisme ekonomi yang terbentuk di ASEAN dalam bentuk AEC, memaksa Indonesia untuk menyepakati hal tersebut. Ganewati Wuryandari memberikan pendapat bahwa Indonesia mau atau tidak, pada akhirnya akan menyepakati AEC. Apabila Indonesia tidak ikut dalam arus tersebut maka bisa jadi Indonesia akan diasingkan dalam pergaulan regional yakni ASEAN. Tidak hanya itu kebijakan tersebut juga punya motif ekonomi yang kuat bagi Indonesia.²¹ Peneliti melihat bahwa SBY juga punya niatan yang kuat untuk memulihkan dan memperbaiki ekonomi nasional dengan cara ikut dalam AEC.

c. Ekonomi dan Militer

Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB.²²

Urutan 10 besar ranking militer se dunia dipegang secara berturut-turut : AS, Rusia, China, India, Inggris, Turki, Korsel, Perancis, Jepang dan Israel. Kemudian urutan 11 sampai dengan 20 besar adalah Brasil, Iran, Jerman, Taiwan, Pakistan, Mesir, Italia, Indonesia, Thailand dan Ukraina. Ranking negara ASEAN yang

¹⁹ Adriana Elisabeth, *Globalisasi Ekonomi dan Politik Luar Negeri Indonesia dalam, Ganewati Wuryandari, Politik Luar Negeri Indonesia : Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*, LIPI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm. 81-85

²⁰ Ganewati Wuryandari, *Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia : Sebuah Catatan Yang Terlewatkan*. dalam Ganewati Wuryandari (editor), *Politik Luar Negeri Indonesia :*

Di Tengah Pusaran Politik Domestic, LIPI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 14-18

²¹ Bersumber Dari Wawancara Peneliti dengan Dr. Ganewati Wuryandari peneliti senior LIPI (*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*) bidang politik . Wawancara Dilakukan pada Senin, 24 Januari 2016 di Jakarta.

²² <http://www.juproni.com/2014/03/makalah-perkembangan-ekonomi-pada-masa.html> diakses pada 5 maret 2016, pukul 11.29 WIB.

lain adalah Filipina ada di posisi ke 23, Malaysia posisi ke 27.²³

Tahun ini adalah tahun akhir pemerintahan SBY setelah selama 10 tahun memberikan warna bangkitnya perekonomian negeri ini. Hasilnya saat ini adalah kekuatan ekonomi Indonesia berada di 15 besar dunia, nomor 1 di ASEAN, pendapatan per kapita mencapai US \$ 4.000,- pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 5-6 % per tahun. Bandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Ini fakta tak terbantahkan dan yang merilis laporan ini adalah berbagai lembaga keuangan internasional.²⁴ Sebuah situs yang membahas kekuatan militer dunia, **Global Fire Power** merilis sebuah data dalam situsnya bahwa pada tahun 2014 kekuatan militer Indonesia menduduki peringkat 19 diatas semua negara Asia Tenggara. Hebatnya, pada 15 Agustus 2015, kekuatan militer Indonesia naik ke peringkat 12 mengungguli Australia dan Itali yang bisa dikatakan maju dalam segi teknologi dan pengetahuannya.²⁵ Peringkat kekuatan militer Indonesia yang masih nomor 1 di ASEAN tentunya punya pengaruh penting dalam proses kebijakan luar negerinya. Namun dalam tataran internasional Indonesia mengalami penurunan peringkat kekuatan militer yakni pada posisi 18 dan 12.

d. Kontesk Politik Domestik

Demokratisasi yang terjadi di Indonesia tersebut memberikan sedikit harapan positif. Namun yang terjadi adalah kasus korupsi semakin merajalela, tidak hanya di pusat tapi juga sampai di daerah bahkan sampai ke desa. Kondisi yang semacam ini bukan semata-mata karena proses demokratisasi tersebut. Namun pada masa orde baru, korupsi hanya terjadi di pusat dan beberapa lingkungan istana yang dekat dengan presiden.

Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi 2014. Dan ternyata negara yang paling bersih dari korupsi adalah Denmark, lalu disusul Selandia Baru, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Swiss. Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk 10 besar, tepatnya menempati urutan ke-7 sebagai negara paling bersih dari korupsi. Sementara Indonesia, masih berada di

peringkat 107 atau naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya.²⁶

Survei Transparansi Internasional pada tahun 2004 menyebutkan nilai indeks persepsi korupsi Indonesia yaitu 2,0. Indeks itu membawa Indonesia pada peringkat 137 dari 146 negara. Pada tahun 2005, indeks persepsi korupsi mencapai 2,2 dan membawa Indonesia pada peringkat 140 dari 159 negara. Terakhir, pada tahun 2008, indeks persepsi korupsi mencapai 2,6 dan Indonesia berada ada urutan ke-126 dari 180 negara.²⁷

Transparansi Internasional Indonesia (TII) kembali meluncurkan hasil indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2012. Pada 2007 survei mencakup 180 negara. Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2010 survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai index 3,0. Untuk tahun 2012 peringkat Indonesia merosot menjadi ke urutan 118 dari 176 negara yang diukur.²⁸

Kondisi politik domestik masa SBY memang relatif stabil. Adapun konflik yang terjadi antara pemerintah dan parlemen masih bisa diatasi dengan bijaksana. Namun persoalan korupsi masa SBY menjadi catatan tersendiri. Ini adalah bagian dari kondisi politik dalam negeri Indonesia. Korupsi adalah salah satu unsur penting yang menghambat pembangunan nasional, baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.

C. Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi AEC (*Asean Economic Community*)

Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi *Asean Economic Community* (AEC) menjadi suatu persoalan yang seharusnya sudah dibaca oleh pemerintah Indonesia. Karena apabila kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam AEC tidak dibarengi dengan kesiapan maka peluang dan keuntungan yang akan digapai Indonesia dalam AEC akan menjadi kontra-produktif. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC adalah suatu persoalan penting dan patut untuk di kaji, sehingga Indonesia tahu mana yang kemudian menjadi

²³KEKUATAN MILITER INDONESIA NOMOR 18 DI DUNIA
[HTTP://WWW.PUSAKAINONESIA.ORG/KEKUATAN-MILITER-INDONESIA-NOMOR-18-DI-DUNIA/](http://www.pusakaindonesia.org/kekuatan-militer-indonesia-nomor-18-di-dunia/) DIAKSES PADA 5 MARET 2016, PUKUL 11.39 WIB.

²⁴10 TAHUN MASA PRESIDEN SBY, ALUTSISTA TNI MENINGKAT TAJAM
[HTTP://WWW.TNIAD.MIL.ID/INDEX.PHP/2014/06/10-TAHUN-MASA-PRESIDEN-SBY-ALUTSISTA-TNI-MENINGKAT-TAJAM/](http://www.tniad.mil.id/index.php/2014/06/10-tahun-masa-presiden-sby-alutsista-tni-meningkat-tajam/) DIAKSES PADA 5 MARET 2016, PUKUL 11.39 WIB.

²⁵ALASAN KEKUATAN MILITER INDONESIA DISEGANI OLEH DUNIA
[HTTP://WIZAMISASI.COM/KEKUATAN-MILITER-INDONESIA/](http://wizamisasi.com/kekuatan-militer-indonesia/) DIAKSES PADA 5 MARET 2016, PUKUL 11.51 WIB.

²⁶<http://news.liputan6.com/read/2144872/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2014-naik-7-peringkat> diakses pada 5 maret 2016, pukul 16.07 WIB.

²⁷<http://politik.news.viva.co.id/news/read/14400-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik> diakses pada 5 maret 2016, pukul 16.11 WIB.

²⁸<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372962-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot> diakses pada 5 maret 2016, pukul 16.14 WIB.

peluang dan mana yang kemudian menjadi suatu tantangan untuk dengan segera diselesaikan. ASEAN yang kemudian bersepakat untuk membentuk pasar bebas di intra kawasan membuat siapapun anggota negara tersebut, apapun bentuk dan sistem politik dan ekonomi yang dianut negara tersebut pada akhirnya harus menyesuaikan dengan konsepsi AEC.

Kondisi ekonomi nasional Indonesia Pasca Orde memang tidak menunjukkan progresifitas yang baik apabila dibandingkan dengan kondisi ekonomi masa Orde Baru. Kejatuhan rezim pemerintahan Soeharto pada 1998 menjadi babak baru bagi Indonesia. Krisis yang melanda pada tahun 1997 mendadak membuat ekonomi Indonesia *collaps*. Gejolak ekonomi global (krisis moneter) meruntuhkan ekonomi Indonesia yang pada akhirnya meransek ke politik dengan jatuh rezim Orde Baru. Pada saat itu maka Indonesia hampir bisa dikatakan bangkrut total. Ekonomi sudah hancur, politik juga demikian.

Peneliti mencoba menyajikan beberapa data terkait ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi ASEAN economic community, berikut beberapa penjelasannya:²⁹

1. Indonesia menduduki peringkat 42 dan 38 pada tahun 2000 dan 2003 berdasarkan Peringkat Negara-Negara Asia Timur dan Pasifik Berdasarkan Indeks CIP (*Competitiveness Industrial Performance*) tahun 2000 dan 2003
2. Arus Investasi Langsung Indonesia (FDI) ke ASEAN 2008-2009 masih kalah dibanding dengan Singapura, Filipina dan Thailand
3. Indonesia menduduki peringkat 25 dan 23 dalam Indeks Kepercayaan Investasi Asing Langsung tahun 2003 dan 2004
4. Indonesia mendapat ranking ke 114 dunia dalam Peringkat Kemudahan Memulai Usaha. Masih kalah dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina bahkan kalah dengan Brunei Darussalam
5. Dalam Indeks Pembangunan Manusia Negara-Negara ASEAN 2007 Indonesia mendapat ranking 107 (dunia) masih kalah dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina bahkan kalah dengan Brunei Darussalam
6. Indonesia mendapat posisi no. 1 dalam Tingkat Pengangguran Negara-negara ASEAN tahun 2005/2008

Data yang disajikan diatas adalah suatu fakta bahwa dalam banyak sudut pandang agaknya tidak siap dalam menghadapi AEC. Ini menjadi tugas pemerintah (terutama) dan seluruh masyarakat Indonesia dari semua elemen untuk bisa bangkit dan siap untuk menikmati dan ambil bagian dalam AEC.

D. Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Piagam ASEAN/ ASEAN Charter di syahkan oleh pemerinah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Undang-undang tersebut disyahkan pada 6 November 2008, hal ini berarti Indonesia menyepakati dan patuh terhadap segala aturan, prinsip, norma dan sanksi yang terkandung dalam *ASEAN Charter*.³⁰ Pengesahan *ASEAN Charter* tersebut juga berhubungan dengan konsep pembentukan kawasan ekonomi integratif di ASEAN yang dikenal dengan AEC (*Asean Economic Community*). Karena Pada 20 November 2007, ketika KTT ke-13 ASEAN digelar di Singapura, para pemimpin ASEAN menandatangani Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ini berarti bukan hanya Indonesia yang menyepakati AEC tapi juga seluruh negara anggota ASEAN.³¹

Adapun beberapa proses ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengesahkan Undang-Undang nomor 38 tahun 2008 tentang Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut :

Departemen luar negeri mengajukan permohonan izin prakarsa penyusunan RUU (hanya sebagai formalitas, karena biasanya pada rapat-rapat interdep terdahulu, instansi teknis beserta departemen luar negeri telah menyusun RUU terlebih dahulu). Dilampirkan pula copy naskah perjanjian sebanyak 30 (tiga puluh) copy, plus 1 (satu) yang telah di *Certified True Copy*. Setelah dipelajari oleh Sekneg, kemudian diteruskan kepada presiden melalui hirarki yang sama dengan pembuatan keppres. Setelah presiden menyetujui permohonan tersebut kemudian sekneg Cq. Bagian ratifikasi memberitahukan kepada departemen luar negeri. Selanjutnya departemen luar negeri beserta instansi teknis terkait dan juga sekneg, kembali mengadakan rapat interdep untuk membahas RUU pengesahan yang biasanya telah disiapkan sebelum pengajuan permohonan tentang pelaksanaan perjanjian

²⁹ Data tersebut diambil dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya.

³⁰ Piagam ASEAN/ASEAN Charter
<http://www.asean.org/storage/images/archive/AC-Indonesia.pdf> diakses pada 23 Mei 2016

³¹ Op.cit ASEAN, D. J. K. S., & RI, D. L. N. (2011). Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN.
<http://blog.ub.ac.id/hidsaljamil/files/2013/10/Cetak-Biru-Komunitas-Ekonomi-ASEAN.pdf> diakses pada 21 Mei 2016

tersebut. Tata cara penyiapan RUU tersebut diatur dalam keppres no. 188 tahun 1998 tentang tata cara mempersiapkan rancangan Undang-undang.³²

Setelah rapat interdep itu selesai, selanjutnya departemen luar negeri mengirimkan RUU yang telah disetujui dalam rapat tersebut ke sekneg beserta naskah akdemisnya. Sekneg kemudian akan meneruskan kepada presiden untuk kemudian presiden mengeluarkan ampres (amanat presiden) yang telah ditandatanganinya (ditujukan kepada Ketua DPR, yang isinya meminta DPR untuk membahas RUU tersebut), selanjutnya mengirimkan ke DPR (pasal 18 keppres no. 188 tahun 1998). Setelah DPR menerima ampres kemudian DPR melakukan rapat pembahasan RUU. Setelah DPR melakukan pembahasan RUU dan menyetujuinya, maka DPR mengirimkan hasil persetujuannya kepada sekneg untuk diteruskan kepada presiden. RUU yang telah disetujui oleh DPR itu ditandangi dan sahkan oleh Presiden.³³

a. Proses Rafitikasi Perjanjian Internasional Melalui Keputusan Presiden/Keppres

Selain menggunakan undang-undang, ratifikasi perjanjian internasional juga bisa disahkan melalui keputusan presiden/Keppres. Berikut peneliti jelaskan mengenai pengesahan perjanjian internasional melalui Keppres Menurut Keppres No. 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan disesuaikan Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Departemen luar negeri mengajukan proses permohonan ratifikasi perjanjian internasional kepada Sekneg. Disertai pula copy naskah perjanjian sebanyak 30 (tiga puluh) copy, plus 1 (satu) yang telah di *Certified True Copy*. Setelah dipelajari oleh Sekneg, selanjutnya diteruskan kepada presiden melalui tingkatan hierarkinya yaitu mulai dari bagian ratifikasi kepada biro hukum, kemudain kepada deputi esselon I diteruskan kepada Sekneg. Setelah itu diberikan kepada presiden ketika diproses untuk diberikan kepada presiden disertai dengan RKP (Rancangan Keputusan Presiden), memo beserta ampres (amanat presiden) untuk ditandatangani oleh presiden. Isi ampres tersebut ditujukan kepada ketua DPR, yang memberitahukan bahwa pemerintah Indonesia telah mengesahkan perjanjian interasional tersebut dengan keppres, agar diketahui oleh DPR. Terhadap RKP

yang telah ditandatangani oleh presiden dan telah menjadi keppres, diserahkan kembali ke bagian ratifikasi sekneg melalui hierarki yang sama seperti sebelumnya dan dituangkan ke dalam lembaga oleh Sekneg.³⁴

IV. KESIMPULAN

Dari penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam menyepakati AEC (*ASEAN Economic Community*), adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Indonesia tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah faktor eksternal berupa sistem politik dan ekonomi global, globalisasi pada wilayah ekonomi (kapitalisme) dan kemajuan teknologi dan informasi, serta perkembangan regionalisme. Kedua yakni faktor Internal yang lebih menitikberatkan pada kondisi politik domestik, ekonomi dan militer, dan aktor (prilaku) pemerintah. Selanjutnya peneliti menemukan bahwa faktor yang lebih dominan dalam mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam menyepakati (ratifikasi ; proses dalam negeri) AEC adalah faktor eksternal berupa sistem politik dan ekonomi global, globalisasi dan perkembangan mutakhir terkiat regionalims (sebut ASEAN).

Apabila menilik pada kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC maka peneliti berkesimpulan bahwa Indonesia belum siapn untuk menghadapi AEC. Dengan data yang disajikan diatas maka peneliti agaknya pesimis Indonesia mampu memanfaatkan peluang dalam dinamika pasa bebas dan kapitalisme yang ada dalam AEC. Yang mana dalam beberapa hal harusnya Indonesia mampu sebagai pemain utama dalam AEC.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chris brown. *Understanding international relation*, 2nd Edition. London. Palgrave. 2001
- [2] Edy Burmansyah. *Rezim Baru ASEAN : Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Pustaka sempu. 2014
- [3] Erani Yustika. *Ekonomi Politik : Kajian Teoritis dan Analisa Empiris*. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.2011R. Nicole, "Title of paper with only first word capitalized," J. Name Stand. Abbrev., in press.
- [4] Ganewati Wuryandari. *Poltik Luar Negeri Indonesia : Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. LIPI. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011

³² Op.cit Hadi Purwandoko, P. (2003). IMPLEMENTASI RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 24 TAHUN2000. *YUSTISIA*, 60.

<http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/Yustisia/article/view/89/77> diakses pada 21 Mei 2016

³³ Ibid

³⁴ Op.cit Hadi Purwandoko, P. (2003). IMPLEMENTASI RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 24 TAHUN2000. *YUSTISIA*, 60.

<http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/Yustisia/article/view/89/77> diakses pada 21 Mei 2016

- [5] G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, "On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions," Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529–551, April 1955. (references)
- [6] H.M. Sabir. Politik Bebas Aktif : Tantangan dan Kesempatan. Jakarta Inti Dayu Press, , 1987
- [7] Helene S. Nesadurai. Globalization, Domestic Politics and Regionalism. Routledge. New york. 2003.
- [8] H.J. Morgenthau, Politics Among Nation : The Struggle of Power, (6th end, new york, 1985).
- [9] LIPI. Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008
- [10] Marijke Breuning. Foreign policy analysis : A Comparative introductions. New York. Palgrave Macmillan. 2007
- [11] William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis, Bandung, Penerbit Sinar Baru., 1992,
- [12] <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKewiFjvBDIO3MAhXFP48KHVYQAfoQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fpusatdata%2Fdownloadfile%2F4df9a8d3ba7a5%2Fparent%2F4df9a8a5c2e3c&usg=AFQjCNE-FofkaNgBUiNcb5V9fioM1p-Hjg&sig2=s9jBNBgL8RVDQWUwU5hHBQ&bvm=by.122448493.d.c2l> diakses pada Minggu, 22 Mei 2016
- [13] <http://www.juproni.com/2014/03/makalah-perkembangan-ekonomi-pada-masa.html> diakses pada 5 maret 2016, pukul 11.29 WIB.
- [14] **Kekuatan Militer Indonesia Nomor 18 di Dunia** <http://www.pusakaindonesia.org/kekuatan-militer-indonesia-nomor-18-di-dunia/> diakses pada 5 maret 2016, pukul 11.39 WIB.
- [15] **0 Tahun Masa Presiden SBY, Alutsista TNI Meningkatkan Tajam** <http://www.tniad.mil.id/index.php/2014/06/10-tahun-masa-presiden-sby-alutsista-tni-meningkat-tajam/> diakses pada 5 maret 2016, pukul 11.39 WIB.
- [16] **Alasan Kekuatan Militer Indonesia Disegani oleh Dunia** <http://wizamisasi.com/kekuatan-militer-indonesia/> diakses pada 5 maret 2016, pukul 11.51 WIB.
- [17] <http://news.liputan6.com/read/2144872/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2014-naik-7-peringkat> diakses pada 5 maret 2016, pukul 16.07 WIB.
- [18] http://politik.news.viva.co.id/news/read/14400-indeks_persepsi_korupsi_indonesia_membalik diakses pada 5 maret 2016, pukul 16.11 WIB.
- [19] <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372962-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot> diakses pada 5 maret 2016, pukul 16.14 WIB.
- [20] Piagam ASEAN/ASEAN Charter <http://www.asean.org/storage/images/archive/AC-Indonesia.pdf> diakses pada 23 Mei 2016
- [21] ASEAN, D. I. K. S., & RI, D. L. N. (2011). Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. <http://blog.ub.ac.id/hidsaljami/files/2013/10/Cetak-Biru-Komunitas-Ekonomi-ASEAN.pdf> diakses pada 21 Mei 2016
- [22] Hadi Purwandoko, P. (2003). IMPLEMENTASI RATIFIKASI PERIANIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 24 TAHUN2000. YUSTISIA. 60. <http://iurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/Yustisia/article/view/89/77> diakses pada 21 Mei 2016